

Judul : Puteri Soroti DAU Untuk Pengangkatan PPPK
Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Puteri Soroti DAU Untuk Pengangkatan PPPK



Puteri Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mempertanyakan kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, yang di antaranya adalah jutaan honorer yang telah mengabdikan hingga 15 tahun.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 mencapai hingga Rp 816,2 triliun, atau lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya Rp 785,7 triliun.

Sebagai bagian dari TKD, Dana Alokasi Umum tercatat terealisasi 100 persen atau setara Rp 378 triliun.

"Seperti yang disampaikan Pak Dirjen, alokasi DAU tahun kemarin juga dialokasikan untuk pengangkatan PPPK yang menjadi bagian dari pemenuhan Belanja Wajib minimal 25 persen. Untuk itu, kami ingin mengetahui seperti apa realisasinya. Berapa persen juga daerah yang sudah menjalankan mandat ini," ungkap Puteri, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen DJPK Kementerian Keuangan di Gedung Perlemen, Senayan, Jakarta.

Srikandi Milenial Beringin di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini mengungkap-

kan, selama ini sering menerima keluhan dari guru honorer maupun tenaga baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang mempertanyakan kejelasan akan status pengangkatannya.

Padahal, mereka sangat menunggu kepastian dan berharap banyak agar bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK.

"Artinya, nasib dan kesejahteraan mereka ini juga sangat ditentukan dari segi anggaran yang dimandatkan kepada pemerintah melalui DAU ini," ungkap Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.

Tak hanya itu, Puteri juga mempertanyakan terkait kebijakan penggunaan DAU untuk pengangkatan PPPK tahun ini.

Aspirasi Kepala Desa

Lebih lanjut, Puteri juga menyampaikan aspirasi Kepala Desa (Kades), yang mempertanyakan realisasi penggunaan 3 persen Dana Desa untuk operasional Kepala Desa yang juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Selain hal tersebut, persoalan terkait kesejahteraan perangkat desa yang juga harus diperhatikan DJPK dalam merumuskan kebijakan Dana Desa. Karena mereka lah yang juga mendukung kelancaran pemerintahan desa dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah," beber Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berpesan kepada DJPK, agar senantiasa mengawal perencanaan dan penganggaran di daerah supaya selaras dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan daerah.

"Apalagi, ini juga diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Salah satu tujuannya untuk semakin meningkatkan kualitas belanja daerah," pungkas Puteri. ■ KAL